



Perubahan Tahapan Proses pada Revitalisasi Perkotaan di Kelurahan Mojo, Surakarta

Aditya Wahyu Hidayat, Isti Andini, Murtanti Jani Rahayu

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

Abstrak: Proses revitalisasi perkotaan merupakan suatu proses penataan ruang secara terencana. Di dalam proses revitalisasi, banyak terdapat hierarki proses dimana proses yang terjadi pada lingkup internal jarang terlihat walaupun memiliki pengaruh terhadap keberhasilan yang tinggi. Seperti halnya terdapat pada Lokus Penataan RW 01 Mojo, Surakarta yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai perubahan proses tersebut dimana terdapat proses formal yang menjadi acuan utama, serta penambahan proses informal baru yang menjadi pembahasannya. Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel proses revitalisasi, variabel jenis tahapan proses, dan variabel perubahan pada proses. Hal tersebut dilakukan dengan analisis koding dan deskriptif secara mendalam pada setiap variabelnya. Penelitian ini menghasilkan perubahan pada proses revitalisasi pada studi kasus dengan hasil terdapat proses informal tambahan yang terbentuk diantara proses formal yang telah direncanakan dikarenakan dua faktor, yaitu faktor *stakeholder* dan faktor urgensi.

Kata kunci: Perubahan, Proses, Revitalisasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/scbmej.v1i4.2698>

*Correspondence: Aditya Wahyu

Hidayat

Email: adityawahyu@student.uns.ac.id

Received: 25-08-2024

Accepted: 22-09-2024

Published: 31-10-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Urban revitalization is one of the planned spatial arrangement process. Within this revitalization process, there are a hierarchy of processes, some of which occur internally and are rarely exposed, despite their significant impact on success. For instance, this phenomenon is observed in the case study of Lokus Penataan RW 01 Mojo, Surakarta. The study discusses changes in these processes, including the formal reference process and the addition of new informal processes. The study uses three variables: revitalization process, type of process stage, and changes in the process. The changes is identified by coding analysis and in-depth descriptive analysis in each variables. As a result, the research identifies additional informal processes that emerge alongside the planned formal process due two major factor: stakeholder and planning urgency.*

Keywords: *Change, Process, Revitalization*

Pendahuluan

Proses revitalisasi perkotaan merupakan proses penataan yang dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur, membangun fasilitas publik, hingga mengembangkan kegiatan ekonomi dan sosial (Herlina et al., 2019). Proses revitalisasi tersebut dapat terbagi menjadi dua dalam penerapannya, yaitu *top-down* dan *bottom-up* (Laretna T, 2002). Dalam proses perbaikan tersebut, melalui beberapa tahapan untuk dapat mencapai tujuan utama.

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian mengenai perubahan pada proses *public private partnership* (South, 2019), studi mengenai perubahan proses yang dipengaruhi oleh *stakeholder* (Mari & Pirozzi, 2024). Revitalisasi perkotaan di Pasar Baru, Jakarta (Cahyono et al., 2017). Hingga penelitian penataan kawasan permukiman kumuh Kawasan Semanggi dengan Konsep *Urban Sustainable Settlement* (Latif, 2020). Semua penelitian tersebut melihat dari proses secara keseluruhan, yaitu proses formal. Akan tetapi banyak kegiatan yang bukan formal atau informal serta *stakeholder* lingkup internal yang berperan penting dalam keberhasilan revitalisasi perkotaan ini yang belum tersorot, sehingga pada penelitian ini akan berfokus terhadap tingkat komunitas atau internal.

Tahapan tersebut terbagi menjadi empat tahapan, yaitu tahapan persiapan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Namun, dalam melakukan proses tersebut pastinya terdapat permasalahan. Saat *stakeholder* dihadapkan oleh permasalahan yang urgent, mereka cenderung menciptakan skenario diluar perencanaan awal (Clark et al., 2000). Skenario tersebut dapat membentuk proses baru, dimana (Briassoulis & Ph, 1997) menjelaskan terdapat dua proses yaitu formal dan informal. Proses formal merupakan proses yang direncanakan, sedangkan proses informal merupakan proses yang tidak direncanakan. Hal tersebut terdapat pada proses revitalisasi yang berada pada Lokus Penataan RW 01 Mojo.

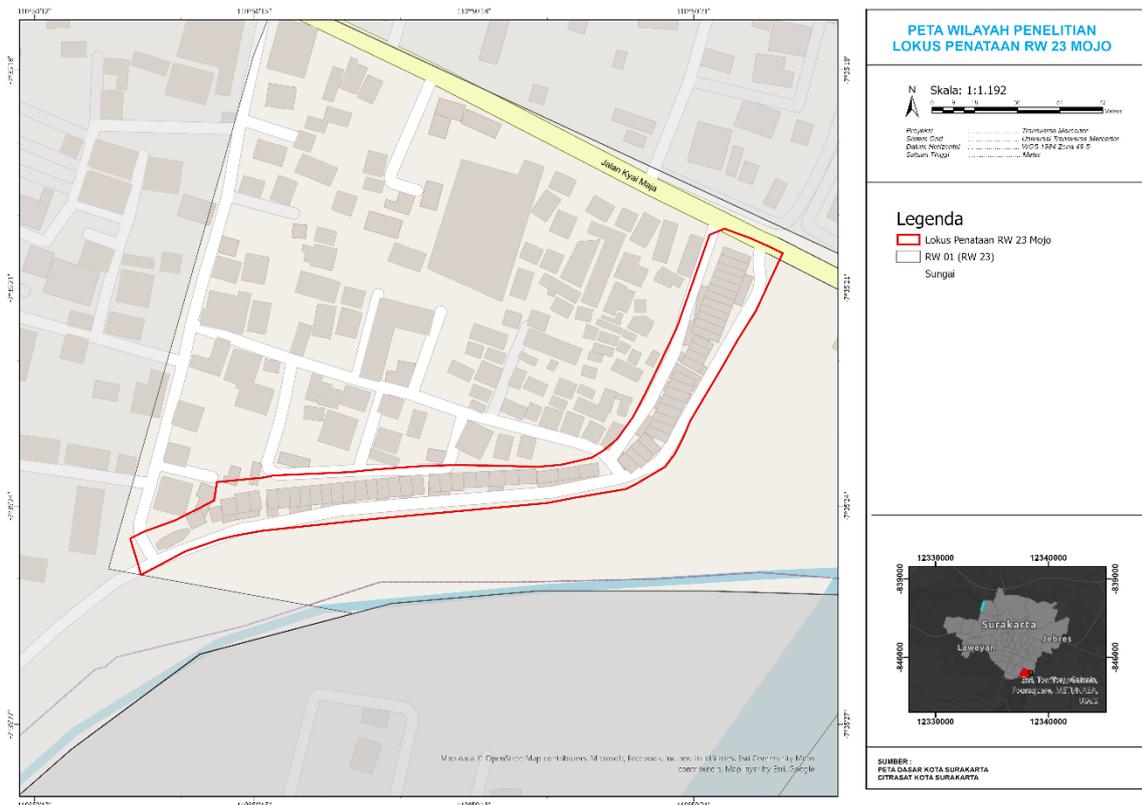
Pada studi kasus tersebut menjadi menarik dikarenakan merupakan *remote project* revitalisasi perdana yang dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan percontohan revitalisasi setelahnya. Walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertama, hal tersebut tidak menjadikan hambatan dan melihat dari perubahan morfologi, revitalisasi ini dapat dikatakan berhasil.

Keberhasilan tersebut bukan tanpa adanya masalah atau hambatan, namun terdapat proses internal yang andil dalam mendukung keberhasilan proses tersebut. Proses internal di sini merupakan proses informal serta proses formal sebagai acuan dan dibatasi dalam lingkup komunitas. Hal tersebut dengan pertimbangan tidak banyak penelitian yang mengekspose proses internal dalam keberhasilan program.

Sehingga memunculkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui perubahan proses dalam revitalisasi perkotaan ini. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan proses penataan, dan sasarannya ialah mengidentifikasi proses formal, kedua mengidentifikasi proses informal, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi perubahannya.

Metode

Ruang lingkup yang membatasi penelitian ini adalah pada Lokus Penataan RW 01 Mojo yang memiliki batas karakter. RW 01 Mojo ini dulunya merupakan RW 23 sebelum direvitalisasi. Wilayah tersebut berada pada Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon Surakarta. Kawasan ini memiliki luas sebesar 6 km² yang merupakan kawasan fungsional bukan administratif di bawah RW 01 (RW 23) Kelurahan Mojo. Di dalam kawasan ini terdiri dari tiga RT, yaitu RT 03, 06, dan 07.



Gambar 1. Peta Administrasi Kawasan Perencanaan
Sumber: Penulis (2024)

Penelitian mengambil studi kasus pada Lokus Penataan RW 01 Mojo dengan alasan dimana lokasi tersebut merupakan *remote project* atau pertama kali dilaksanakan revitalisasi perkotaan di Kota Surakarta. Proses revitalisasi tersebut dapat dikatakan berhasil melihat dari perubahan morfologi yang lebih tertata. Sehingga proyek lokasi tersebut sangat menarik dikarenakan dapat dijadikan sebagai acuan atau *head start* bagi revitalisasi perkotaan selanjutnya.

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan dari penelitian ini mengenai perubahan proses pada revitalisasi perkotaan di Lokus Penataan RW 01 Mojo, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang menjelaskan teori yang masih umum ke khusus. Namun penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana pembahasannya cukup dalam (Miles & Huberman, 1994) dan dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun teori yang digunakan sebagai pedoman ialah proses penataan dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan (Mari & Pirozzi, 2024). Dimana saat *stakeholder*

dihadapkan permasalahan yang *urgent*, mereka akan cenderung menciptakan skenario di luar perencanaan awal (Clark et al., 2000). Sehingga di sini proses penataan memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang berpedoman pada berbagai literatur mengenai proses penataan. Variabel tersebut digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perubahan proses penataan dalam revitalisasi perkotaan yang dilaksanakan di Lokus Penataan RW 01 Mojo. Variabel tersebut membahas mengenai bagaimana proses tahapan dari revitalisasi perkotaan yang dilakukan dengan analisis koding dan deskriptif kualitatif. Kemudian terdapat variabel yang mengklasifikasikan jenis proses tersebut dan dilakukan dengan analisis koding dan deskriptif kualitatif. Yang terakhir akan membahas mengenai perubahan pada proses penataan yang terjadi pada studi kasus dari penelitian ini. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Komponen Analisis Proses Revitalisasi

Variable	Sub Variabel	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> Proses Revitalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Tahapan Proses Revitalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Proses revitalisasi terbagi menjadi empat tahapan, yaitu sebelum, persiapan atau perencanaan, proses pembangunan, dan pasca pembangunan
<ul style="list-style-type: none"> Jenis Tahapan Proses 	<ul style="list-style-type: none"> Proses Formal Proses Informal 	<ul style="list-style-type: none"> Proses formal merupakan proses yang berpedoman pada perundang-undangan, secara legal, terencana, hasil dapat diprediksi, dan terdapat pada dokumen perencanaan Proses informal merupakan proses yang terjadi di lingkup internal, peraturan tidak mengikat, koordinasi lebih terbuka, hasil tidak diketahui sebelumnya, dan tidak terdapat pada dokumen perencanaan.
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan pada Proses 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan proses 	<ul style="list-style-type: none"> Proses perencanaan sangat dinamis dapat berubah atas urgensi maupun <i>stakeholder</i>.

Sumber: Artto et al., (2001); Briassoulis & Ph, (1997); Cahyono et al., (2017); Chang & Lin, (2022); Cherry, (1996); Danisworo M, (2002); Dewar, (2003); Edkins et al., (2013); Herlina et al., (2019); National League of Cities, (2006); Padgett & Powell, (2012); Purwantiasning et al., (2014); Ramadhan et al., (2016); Shui et al., (2014); Widodo et al., (2018)

Untuk mendukung pendekatan penelitian tersebut, maka teknik pengumpulan data akan dilaksanakan melalui wawancara dan FGD kepada *stakeholder* pada program revitalisasi tersebut. Hal ini dilakukan supaya data yang didapatkan mendalam. Selain itu, akan ada *review* dokumen perencanaan sebagai tolak ukur atau penetral untuk hasil

wawancara dan FGD yang telah dilakukan. Adapun tabel kebutuhan data tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Stakeholder

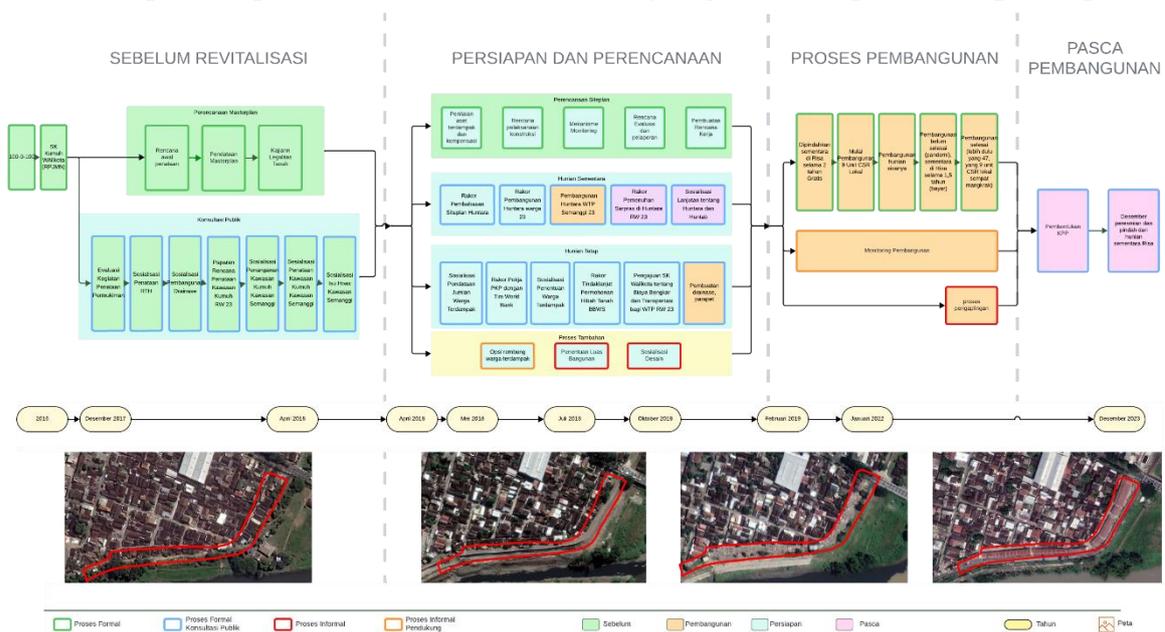
Narasumber	Jumlah
● Lurah Mojo	● 1
● Ketua RW 01	● 1
● Ketua RT	● 3
● Kotaku	● 1
● Warga Terdampak	● 56

Sumber: Penulis (2024)

Hasil dan Pembahasan

Proses Penataan

Revitalisasi perkotaan pada Lokus Penataan RW 01 Mojo terbagi menjadi empat tahapan utama, yaitu tahap awal sebelum intervensi masuk, tahap persiapan dan perencanaan, tahap pembangunan, dan tahap pasca pembangunan. Pada seluruh tahapan tersebut akan dibatasi ke dalam lingkup internal sesuai batasan penelitian yang telah dijelaskan. Berdasarkan analisis coding *review* dokumen, wawancara, serta FGD yang telah dilakukan, didapatkan proses formal dan informal yang tersebar pada setiap tahapan.



Gambar 2. Diagram Proses Revitalisasi Keseluruhan
 Sumber: Penulis (2024)

Pada bagan keseluruhan proses tersebut dapat dilihat bahwa untuk proses yang berwarna hijau merupakan proses formal. Untuk proses yang berwarna oranye merupakan proses informal tambahan. Terdapat juga perubahan morfologi bangunan yang

ditampilkan pada peta tersebut. Untuk pembahasan pada penelitian ini akan dibagi berdasarkan tahapannya.

(1) Tahapan Sebelum Revitalisasi. Kegiatan revitalisasi perkotaan ini berawal dari Kementerian PUPR melalui program 100-0-100. Dalam program tersebut menyebutkan bahwa Kota Surakarta merupakan salah satu Kawasan terkumuh. Sehingga Walikota yang saat itu menjabat membuat SK Kumuh walikota. Kawasan Semanggi yang meliputi empat desa menjadi rangking 1 sebagai Kawasan terkumuh se-Surakarta. Sehingga dilakukan revitalisasi perkotaan untuk pertama kali oleh Kotaku. pada tahapan ini intervensi belum mengkhususkan Lokus Penataan RW 01 Mojo.

Saat tahapan ini Kotaku melakukan intervensi untuk pertama kali mulai tahun 2016 hingga 2018. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, seluruh data sinkron dengan dokumen perencanaan Larap dan Lair yang dapat dikatakan bahwa tahapan ini berjalan sesuai dengan rencana awal. Perencanaan tersebut meliputi serangkaian tahapan penyusunan Masterplan Kawasan Semanggi yang meliputi empat kelurahan. Dan serangkaian proses konsultasi publik.

Namun terdapat satu proses yang terbentuk secara spontan, yaitu proses sosialisasi isu hoaks. Proses tersebut merupakan proses tambahan yang baru terbentuk untuk menyelesaikan isu hoaks yang tersebar pada kawasan. Proses tersebut termasuk pada proses formal dikarenakan terdokumentasi ke dalam dokumen perencanaan walaupun merupakan proses tambahan yang baru terbentuk secara spontan.

(2) Tahapan Persiapan dan Perencanaan. Tahapan selanjutnya dimulai dari intervensi yang mulai mengkhususkan RW 01 Mojo, tepatnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada tahapan ini dapat dikatakan sangat singkat mengingat banyaknya proses yang secara paralel berlangsung. Pada tahapan ini terbagi menjadi empat serangkaian proses.

Serangkaian proses pertama ialah proses penyusunan *siteplan*. Proses ini dimulai dari pendataan hingga pembuatan rencana kerja. Serangkaian proses ini merupakan proses formal yang dikerjakan oleh pihak eksternal.

Serangkaian proses selanjutnya ialah perencanaan hunian sementara. Hunian tersebut diperuntukkan kepada warga terdampak saat hunian tetapnya dibangun. Proses ini berparalel dengan proses lainnya hingga proses pembangunan hunian sementara. Setelah hunian tersebut selesai digunakan, maka akan dipergunakan kepada warga terdampak pada proses revitalisasi ke depannya.

Selanjutnya merupakan serangkaian proses perencanaan hunian tetap. Pada proses ini berisi mengenai proses konsultasi publik. Dimulai dari proses pendataan, hingga pembangunan infrastruktur dasar sebelum membangun hunian seperti drainase, parapet, jalan. Pada proses ini berhasil menyeleksi dari 72 menjadi 56 KK dikarenakan luas tanah yang terbatas.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dan FGD, ditemukan terdapat proses di luar proses formal yang terdokumentasikan di dokumen perencanaan. Terdapat tiga proses yang berparalel dengan proses lain, yaitu pertama opsi rebug warga terdampak. Proses ini terbentuk atas permasalahan warga dimana terdapat rumah yang berada di atas tanggul dan tiga KK meminta masing-masing hunian. Kedua ialah penentuan luas bangunan yang

terbentuk dikarenakan warga sudah mengapling luas tanah sendiri mendahului perencanaan. Ketiga ialah sosialisasi desain oleh Arkom dikarenakan *stakeholder* tersebut memiliki prinsip partisipatif dalam mendesain *siteplan* dan hunian.

(3) Tahapan Proses Pembangunan. Pada tahapan selanjutnya terbagi menjadi tiga proses secara berparalel. Proses pertama merupakan proses formal pembangunan oleh pihak eksternal dimulai pada tahun 2019. Pada proses ini dana yang terkumpul baru bisa meng-*cover* sembilan rumah saja oleh CSR Bank. Selanjutnya setelah mendapat bantuan dana dari SMF, sisanya baru dibangun. Namun yang menjadi unik di sini ialah pada tahun 2022, 47 rumah dari SMF selesai terlebih dahulu meninggalkan sembilan rumah pertama. Setelah itu baru diselesaikan dan mundur selama 1,5 tahun. Selama tambahan waktu tersebut warga membayar hunian sementara dan tidak gratis. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat bencana Covid-19

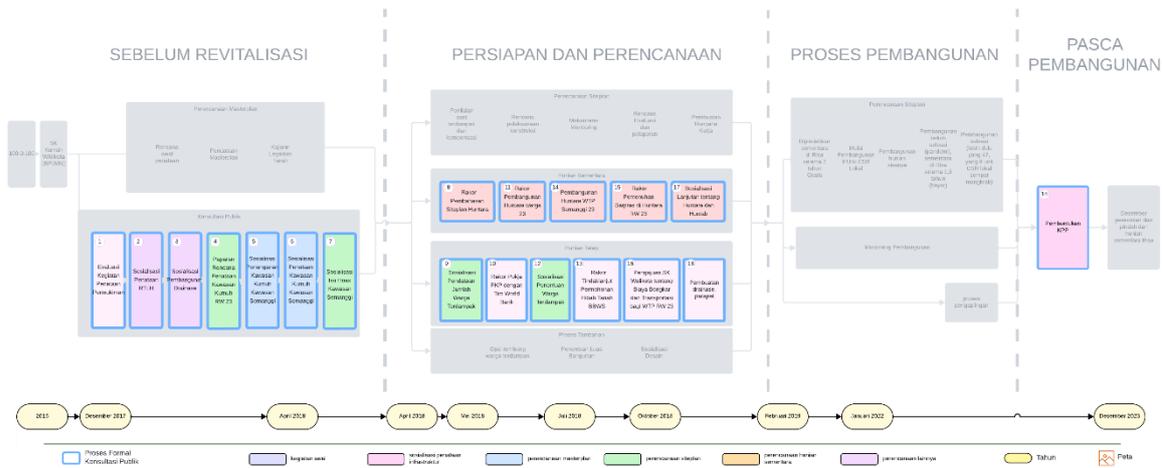
Pada saat yang bersamaan, pada warga dipimpin oleh RW dan Paguyuban membentuk tim baru yaitu monitoring pembangunan. Hal tersebut membentuk proses baru yaitu monitoring pembangunan secara mandiri oleh pihak internal. proses tersebut menghasilkan 15 tipe hunian yang berbeda dari hasil revisi.

Selain itu, terdapat proses informal baru yaitu proses pengaplingan. Proses ini muncul dikarenakan terdapat urgensi penentuan penerima bantuan mendapatkan hunian nomor berapa. Dari proses tersebut didapatkan bahwa posisi dan nomor urut rumah dahulu sama dengan nomor urut hunian sekarang. Hal tersebut atas pertimbangan tidak merubah administratif RT serta tidak perlu adaptasi dikarenakan tetangga kanan kiri sama.

(4) Tahapan Pasca Pembangunan. Setelah pembangunan dilaksanakan, selanjutnya merupakan tahapan pasca pembangunan. Tahapan ini berlangsung selama tahun 2023. Pada tahapan ini terdapat dua proses yaitu proses pembentukan KPP yaitu kelompok di bawah paguyuban untuk memelihara hunian baru, serta peresmian oleh Walikota Surakarta pada Desember 2023.

Proses Formal

Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, masih dapat dikategorikan berdasarkan lingkup pembahasannya. Proses formal di sini akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan dikarenakan proses formal bersifat legal, terdokumentasi, terkait pada aturan perundang-undangan, dan terencana (Briassoulis & Ph, 1997). Pada penelitian ini terdapat tiga proses utama dan 18 proses konsultasi publik.



Gambar 3. Diagram Proses Revitalisasi Keseluruhan
 Sumber: Penulis (2024)

Pada bagan tersebut merupakan bagan proses formal konsultasi publik, dimana masih dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Dari keseluruhan proses tersebut, masih banyak proses yang di luar ruang lingkup penelitian ini, yaitu lingkup komunitas atau internal. maka dari itu akan difokuskan terhadap proses yang berwarna hijau sejumlah empat proses.

- (1) Kegiatan ini merupakan kegiatan resmi yang terdokumentasi dalam LARAP. Dimulai dengan intervensi perencanaan oleh KOTAKU di wilayah perencanaan pada tahun 2016, kegiatan ini fokus pada sosialisasi dan penentuan kawasan perencanaan yang strategis untuk revitalisasi perkotaan. Selain itu, kegiatan ini melibatkan kombinasi antara aspek internal dan eksternal.
- (2) Kegiatan kedua termasuk dalam kegiatan resmi yang terdokumentasi dalam LARAP. Kegiatan ini muncul karena adanya hubungan antara *stakeholder*, yang dapat terjadi karena penyebaran berita hoaks tentang revitalisasi. Berita tersebut menyebabkan ketidaksepakatan pada awal revitalisasi. Isu yang muncul berhubungan dengan pengurusan tanpa ganti rugi oleh pemerintah, yang mengakibatkan ketidaktertiban dalam proses penataan awal. Setelah peninjauan lebih lanjut, hanya RW 23 di Kelurahan Mojo di Kawasan Semanggi yang aman dari berita hoaks dan menerima rencana revitalisasi. Oleh karena itu, *stakeholder* ini termasuk dalam *stakeholder* eksternal di luar kawasan perencanaan.
- (3) Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan resmi karena terdokumentasi dalam LARAP. Dalam kegiatan ini, dilakukan pendataan seluruh warga yang terdampak dan kemudian akan diseleksi. Pendataan ini bertujuan untuk memudahkan proses administrasi di masa depan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi umum seperti KTP, KK, jumlah anggota keluarga, pendapatan, kepemilikan rumah, dan hal-hal lain yang relevan.
- (4) Setelah melakukan pendataan warga, langkah berikutnya adalah menentukan warga yang terdampak dan masih termasuk dalam kegiatan formal. Dalam proses penentuan ini, terdapat tiga indikator penilaian. Pertama, warga harus berdomisili di lokasi perencanaan RW 23. Kedua, mereka tidak boleh memiliki tempat tinggal lain selain di

kawasan perencanaan. Ketiga, warga harus memiliki KTP Solo. Akibat dari ketiga indikator ini, jumlah calon penerima bantuan berkurang dari 72 menjadi 56. Selain itu, dalam proses ini muncul masalah baru yang akan diatasi pada tahapan selanjutnya.

Proses Informal

Selain proses formal, terdapat proses lain yang berasal dari wawancara dan FGD *stakeholder* internal. Proses tersebut merupakan proses internal yang terjadi karena spontan, tidak terkait aturan formal, terjadi di lingkup internal, dan tidak terdapat pada dokumen perencanaan (Briassoulis & Ph, 1997). Dari bagan keseluruhan yang telah ditampilkan, proses informal terdapat pada kotak yang berwarna oranye.



Gambar 4. Diagram Proses Revitalisasi Keseluruhan
 Sumber: Penulis (2024)

Pada penelitian ini ditemukan terdapat lima proses informal yang berparalel terhadap proses formal. Proses tersebut ada pada persiapan dan perencanaan, serta proses pembangunan. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut.

- (1) Kegiatan Opsi Rembug Warga Terdampak termasuk dalam kegiatan pendukung karena terjadi tanpa perencanaan dan berlangsung di tingkat internal. Dimulai dengan adanya masyarakat yang tinggal di atas parapet. Selain itu juga masalah di mana sebelumnya satu rumah dihuni oleh lebih dari satu KK dan mereka meminta hak untuk mendapatkan hunian tetap masing-masing. Permasalahan ini dapat diatasi secara internal. Dengan menyelesaikan semua hunian terdampak agar masuk ke dalam kawasan perencanaan, serta memberikan tiga KK tersebut rumah, situasi yang semakin memanas dapat diatasi.
- (2) Setelah mengidentifikasi pihak yang terdampak, selanjutnya adalah menentukan ukuran bangunan. kegiatan ini termasuk dalam kegiatan informal walaupun sudah direncanakan sebelumnya, namun tidak terdokumentasi dalam perencanaan LARAP. Dalam hal ini, diskusi lebih lanjut dilakukan secara internal, di mana warga telah membagi-bagi lahan sesuai dengan ukuran tanah sebelumnya mendahului kesepakatan bersama, meskipun ada larangan dari pihak tertentu. Kemudian dihasilkan ukuran bangunan menjadi seragam di hunian tetap.

- (3)Langkah selanjutnya adalah kegiatan informal yang sebenarnya sudah direncanakan, meskipun tidak terdokumentasi dalam perencanaan. Dalam tahap ini, warga diberi informasi oleh Arkom mengenai desain dan *siteplan* yang telah disusun. Proses ini berjalan seiring dengan pembuatan *siteplan*, di mana *stakeholder* eksternal merencanakan berdasarkan kebutuhan warga yang terdampak. Diskusi terbuka untuk semua masukan, meskipun warga sendiri tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif.
- (4)Langkah berikutnya adalah proses pembangunan, yang terbagi menjadi dua jalur secara paralel. Proses utama adalah pembangunan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan dimulai dengan membangun 9 unit terlebih dahulu, mengikuti anggaran dari CSR Bank. Setelah itu, sisa pembangunan dilakukan oleh CSR lainnya. *Stakeholder* internal tidak terlibat dalam proses ini dan hanya diberikan hunian sementara untuk tinggal. Meskipun demikian, pihak internal mengambil inisiatif untuk melakukan pemantauan secara mandiri dengan membentuk Lembaga monitoring di bawah paguyuban dan ada mekanisme pengaduan jika proses pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selama proses tersebut, sekitar 15 desain rumah telah direvisi berdasarkan temuan lapangan.
- (5)Setelah tahap pembangunan selesai, terjadi proses informal yang disebut pengaplingan. Proses ini terjadi ketika warga masih tinggal di hunian sementara dan melibatkan diskusi internal mengenai penempatan setiap bangunan. Dalam diskusi tersebut, warga telah mencapai kesepakatan bahwa nomor urut penerima hunian tetap harus sesuai dengan nomor urut sebelum perencanaan, dan mereka menerima perbedaan desain rumah. Hal ini dilakukan agar tetangga di sebelah kiri dan kanan tetap sama, serta nomor RT juga konsisten

Perubahan pada Proses

Perencanaan pada umumnya menggunakan skenario yang ideal, skematik, dan simpel yang berfokus kepada tujuan utama yang satu (Buehler et al., 1994). Namun hal tersebut yang menjadikan perencanaan ini tidak komprehensif terhadap kondisi ke depannya (Gollwitzer & Moskowitz, 1996). Hal tersebut dapat membuat proses yang sebelumnya sudah terencana menjadi pindah haluan untuk sementara, dalam hal ini penambahan proses informal pendukung, bahkan hingga kegagalan dalam suatu proses.

Berdasarkan hasil temuan sebelumnya, didapatkan dua kategori proses penataan, yaitu proses formal dan proses informal. Adapun proses formal adalah proses yang sudah direncanakan serta didokumentasikan pada dokumen perencanaan. Untuk proses informal sendiri merupakan proses yang berlingkup internal, terjadi secara spontan, dan tidak terdokumentasi pada dokumen perencanaan. Dari pemahaman tersebut dapat kita simpulkan bahwa tahapan proses utama pada revitalisasi ini adalah proses formal. Hal tersebut menjadikan proses informal tidak seharusnya ada, proses tersebut ada dikarenakan sesuatu, dimana sesuatu tersebut merupakan *nexus event*. Berikut merupakan bagan untuk memperjelas proses tersebut.



Gambar 5. Ilustrasi Perubahan pada Proses
 Sumber: Penulis (2024)

Garis yang berwarna hijau merupakan proses formal, kemudian garis hijau putus-putus merupakan tahapan seharusnya proses tersebut berlangsung, dan garis berwarna kuning merupakan proses informal dan proses tambahan. Untuk garis merah tersebut merupakan nexus event atau titik balik proses yang dapat mengubah tahapan dari sebelumnya formal menjadi informal atau tambahan.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi titik balik proses penataan ini, yaitu kegagalan dalam tahapan proses penataan, dan hubungan antar *stakeholder*. Pada revitalisasi perkotaan ini terdapat tiga nexus event, yaitu saat proses sosialisasi isu hoaks, proses opsi rebug warga terdampak, dan pembangunan. Untuk proses sosialisasi isu hoaks sebenarnya merupakan proses yang tidak direncanakan, namun proses tersebut menjadi proses formal oleh karena terdokumentasi pada dokumen Larap Mojo.

Tabel 3. Perubahan pada Proses

Proses Acuan (Formal)	Perubahan pada Proses
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Awal • Sosialisasi Isu Hoaks 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perubahan. • Merupakan proses baru yang terbentuk oleh hubungan antar <i>stakeholder</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Jumlah Warga Terdampak • Penentuan Warga Terdampak • Pembuatan <i>Siteplan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perubahan. • Tidak ada perubahan. • Terdapat tiga proses baru yang terbentuk dikarenakan <i>stakeholder</i>, yaitu opsi rebug warga terdampak dikarenakan masyarakat, penentuan luas bangunan, dan sosialisasi desain.
<ul style="list-style-type: none"> • Proses Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memunculkan tiga proses baru dan satu diantaranya dikarenakan <i>stakeholder</i> yaitu proses monitoring pembangunan oleh pihak internal, dua lainnya

Proses Acuan (Formal)	Perubahan pada Proses
	disebabkan oleh urgensi yaitu proses pengaplingan, dan pembentukan KPP

Sumber: Penulis (2024)

Proses informal yang terdapat pada proses penataan ini ada lima. Dari lima tersebut terdapat tiga proses yang menjadi satu serangkaian proses sesuai dengan nexus event. Apabila dilihat lebih lanjut, proses informal tersebut merupakan proses tambahan yang berfungsi untuk menunjang keberhasilan proses penataan. seperti pada penelitian oleh (Mari & Pirozzi, 2024) dimana ditemukan bahwa proses itu bersifat dinamis dan dapat berubah.

Stakeholder di sini memberikan peran besar atas perubahan proses (South, 2019). Pada penelitian ini lima dari tujuh proses informal ada dikarenakan *stakeholder*, selebihnya merupakan faktor urgensi.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dihasilkan bahwa pada proses revitalisasi perkotaan yang terdapat pada Lokus Penataan RW 01 Mojo terdapat proses baru yang terbentuk yaitu proses informal diantara proses formal yang telah direncanakan sebelumnya. Proses tersebut terjadi dikarenakan dua hal, tiga dari lima proses yang terbentuk yaitu oleh *stakeholder* dan dua lainnya dikarenakan oleh urgensi perencanaan.

Daftar Pustaka

- Artto, K. A., Lehtonen, J. M., & Saranen, J. (2001). Managing projects front-end: Incorporating a strategic early view to project management with simulation. *International Journal of Project Management*, 19(5). [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(99\)00082-4](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00082-4)
- Briassoulis, H., & Ph, D. (1997). *Analysis of Land Use Change : Theoretical and Modeling Approaches Table of Contents*. Morgantown: West Virginia University.
- Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(3). <https://doi.org/10.1037//0022-3514.67.3.366>
- Cahyono, E., Kuncoro, A., & Ardianto, T. (2017). Urban revitalization in Jakarta: learning from Pasar Baru. *Procedia Environmental Sciences*, 33, 410–418.
- Chang, J. J., & Lin, C. L. (2022). Establishing Urban Revitalization and Regional Development Strategies with Consideration of Urban Stakeholders Based on the ISA-NRM Approach. *Sustainability (Switzerland)*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/su14127230>

- Cherry, G. E. (1996). Urban revitalization: Policies and programs. *Cities*, 13(3). [https://doi.org/10.1016/0264-2751\(96\)88692-6](https://doi.org/10.1016/0264-2751(96)88692-6)
- Danisworo M. (2002). Revitalisasi Kawasan Kota Lama: Pendekatan Berbasis Sumber Daya Budaya. <http://hendrinet.blogspot.com/2011/12/revitalisasi-sumber-daya-manusia-dalam.html>
- Dewar, M. (2003). Policies and programs. Congressional Research Service. Urban Revitalization.
- Edkins, A., Geraldi, J., Morris, P., & Smith, A. (2013). Exploring the front-end of project management. *Engineering Project Organization Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.1080/21573727.2013.775942>
- Gollwitzer, P. M., & Moskowitz, G. (1996). Goal effects on thought and behavior. In *Social psychology: Handbook of basic principles*.
- Herlina, S., Muis, S., & Hidayat, A. (2019). Strategi revitalisasi Kawasan Pecinan di Kota Pontianak. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 15(1), 55–66.
- Laretna T. (2002). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Revitalisasi Kawasan Kota Lama: Studi Kasus Kawasan Kota Lama Semarang. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 13(1), 17–32.
- Mari, S., & Pirozzi, M. (2024). Managing stakeholder engagement: A critical success factor 1. In *Managing stakeholder engagement: Vol. XIII*. www.pmworldjournal.com
- Muhamad Latif. (2020). Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Semanggi dengan Konsep Urban Sustainable Settlement. In *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- National League of Cities. (2006). National League of Cities Institute for Youth, Education, and Families. *Urban Revitalization: Policies and Practices*.
- Newby-Clark, I. R., Ross, M., Koehler, D. J., Buehler, R., & Griffin, D. (2000). People focus on optimistic scenarios and disregard pessimistic scenarios while predicting task completion times. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 6(3). <https://doi.org/10.1037/1076-898X.6.3.171>
- Padgett, J. F., & Powell, W. W. (2012). The emergence of organizations and markets. In *The Emergence of Organizations and Markets*. <https://doi.org/10.1177/0094306114553217r>
- Purwantiasning, A. W., Schneider, V., & Whittingham, N. (2014). Urban Planning Policies and Strategies for Revitalization: An Overview and Comparison of Experiences from Developed and Developing Regions Dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Internasional: 6th Seminar on Urban Policies Environmental Land Management for Local and Regional Development Universidad Nacional del Nordeste.
- Ramadhan, D. T., Budimanta, A., & Soelarno, S. W. (2016). Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(2). <https://doi.org/10.14710/jil.12.2.92-104>
- Shui, W., Bai, J., Zhang, S., & Chen, Y. (2014). Analysis of the influencing factors on resettled farmer's satisfaction under the policy of the balance between urban construction land increasing and rural construction land decreasing: A case study of China's Xinjin

- county in Chengdu City. *Sustainability* (Switzerland), 6(12).
<https://doi.org/10.3390/su6128522>
- South, A. J. (2019a). An Interdisciplinary Approach to Understanding 'Stakeholders.'
<http://purl.stanford.edu/zm101th7021>
- South, A. J. (2019b). Stakeholder Network Dynamics And The Governance Of Public-Private Partnerships A Dissertation Submitted To The Department Of Civil And Environmental Engineering And The Committee On Graduate Studies Of Stanford University In Partial Fulfillment Of The Requirments For The Degree Of Doctor Of Philosophy. <http://purl.stanford.edu/zm101th7021>
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1). <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61>